

Membangun Budaya Mutu di Sekolah Muhammadiyah¹

Oleh: Farid Setiawan

Jelang akhir bulan Juli yang lewat, SMP Muhammadiyah 3 (Muga) Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan *workshop* tentang budaya mutu di sekolah. Kegiatan yang bertempat di Kaliurang itu diikuti oleh semua guru dan karyawan. Topik mengenai budaya mutu di lingkungan sekolah memang sedang marak diperbincangkan banyak pihak akhir-akhir ini. Kegiatan-kegiatan penunjangnya, seperti; seminar, diskusi publik, dan *workshop* seakan-akan tidak pernah kunjung sepi. Semua kegiatan bertema pengembangan kualitas mutu itu dimaksudkan untuk mengembalikan “citra” lembaga pendidikan di mata masyarakat.

Memang, dalam beberapa waktu terakhir, kredibilitas dan kepercayaan lembaga pendidikan di mata masyarakat mulai berangsur surut. Seolah-olah terdapat perasaan *galau*, sikap antipati dan/atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap sekolah sebagai institusi pendidikan. Dalam pandangan mereka, sekolah belum mampu mengorbitkan peserta didik sebagai manusia-manusia unggul dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Prestasi buruk yang baru diraih sekolah adalah lahirnya para “preman berseragam”, koruptor dan lain seterusnya.

Raport merah lainnya yang dimiliki oleh lembaga pendidikan nasional, yang di dalamnya juga terdapat sekolah-sekolah Muhammadiyah, adalah lemahnya kualitas keluaran (*out-put*) sekolah. Angka pengangguran dan kemiskinan warga yang semakin hari kian meningkat merupakan salah satu indikator dalam melihat kualitas mutu sekolah di Indonesia. Lebih-lebih apabila siswa keluaran sekolah Indonesia coba di sandingkan dengan Negara-negara lain. Berdasarkan *Human Development Report*, UNDP tahun 2005, disebutkan bahwa *Human Development Index* manusia Indonesia paling rendah di antara lima Negara di kawasan Asean (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand).

¹ Artikel ini telah diterbitkan di Majalah Suara Muhammadiyah, edisi 20/93/16 Oktober 2008

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai lemahnya kualitas mutu pendidikan nasional sudah sepatutnya jika sekolah-sekolah di Indonesia, baik negeri maupun swasta, melakukan evaluasi diri (*self-clarification/self-evaluation*). Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk mencegah serta mengantisipasi segala kemungkinan yang akan dihadapi oleh lembaga pendidikan di masa yang akan datang. Serangkaian tantangan dan rintangan yang akan menghadang patut dibaca secara cerdas dengan perangkat analisis intelektual yang akurat. Sehingga, kesatuan visi, misi dan tujuan pendidikan dapat disatukan menjadi kekuatan integral dalam menunjang kualitas mutu pendidikan.

Lantas, bagaimana kecenderungan sekolah-sekolah Muhammadiyah dalam mengembangkan budaya mutu? Apakah orientasi pengembangan kualitas pendidikan Muhammadiyah sudah beranjak untuk menyukseskan budaya mutu di sekolah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan coba diurai dalam tulisan ini secara sederhana.

Sekolah Muhammadiyah dan Budaya Mutu

Istilah yang digunakan oleh SMP Muga mengenai budaya mutu di sekolah Muhammadiyah merupakan suatu hal yang cukup fenomenal dan perlu mendapatkan perhatian prioritas. Budaya mutu merupakan sebuah tantangan sekaligus tuntutan serius yang selayaknya segera dipecahkan oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sekalipun pada beberapa dekade terakhir, banyak praktisi dan pengamat pendidikan mulai melemparkan isu-isu kritis mengenai peningkatan kualitas mutu sekolah. Namun, tidak tertutup kemungkinan apabila isu-isu tersebut hanyalah berfungsi sebagai kata-kata kosong tanpa makna, jikalau tidak didukung oleh budaya sekolah yang mumpuni.

Dalam buku “*Studi Perdamaian; Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*”, Johan Galtung (2003) mengemukakan pertanyaan luar biasa perihal budaya sosial. Menurutnya, “mengapa orang suka membunuh?” Hal itu, tiada lain, di sebabkan karena mereka hidup dan dibesarkan melalui cara-cara serta kebiasaan membunuh. Sekalipun tidak secara langsung orang itu membunuh, akan tetapi, dengan melihat tindakan pembunuhan saban hari sangat mempengaruhi orang untuk menjadi

pembunuh. Jikalau pernyataan Galtung di atas coba dikaitkan dengan problematika mutu pendidikan, maka jawabnya pun kian jelas. Kebiasaan atau budaya (sadar) pengelola untuk merekonstruksi atmosfer mutu pendidikan merupakan tolok ukur yang paling vital dalam menjawab persoalan kehidupan global yang semakin tak menentu perubahannya.

Memang, telah banyak pihak yang menilai bahwa “daya sanding” pendidikan Muhammadiyah masih tergolong lemah. Di mata masyarakat, pendidikan Muhammadiyah merupakan alternatif pilihan bernomor dua setelah sekolah negeri. Hal itu terbukti di saat pilihan masyarakat (dan tak terkecuali juga sebagian para pimpinan dan anggota Muhammadiyah) yang coba melirik sekolah-sekolah negeri dan sekolah berlabel Islam lainnya dibanding sekolah Muhammadiyah sendiri. Sekalipun hipotesa tersebut tidak berlaku bagi semua sekolah Muhammadiyah. Namun, yang jelas, sebuah potret pendidikan Muhammadiyah secara umum dapat dikatakan belum mampu berkompetisi dengan sekolah-sekolah lainnya.

Lemahnya daya saing dan daya sanding pendidikan Muhammadiyah itu tiada lain disebabkan karena terbatasnya kemampuan para *stake-holders* pendidikan (Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, dll) saat mengejawantahkan persoalan kualitas mutu pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Kegagapan mereka dalam membaca dinamika perubahan zaman menjadikan sebagian sekolah Muhammadiyah seringkali berjalan di tempat. Di samping itu, beberapa sekolah Muhammadiyah pun hanya memasang dan memajang slogan-slogan berbunyi “peningkatan kualitas mutu” di dinding tanpa diiringi tindakan yang memadai. Hal itu, meminjam istilah Buya Syafii Maarif, mengesankan terjadinya keretakan antara kata dan laku di dalam diri para pengelola pendidikan Muhammadiyah.

Modal Dasar Pendidikan Muhammadiyah

Apabila ditelisik lebih jauh, pendidikan Muhammadiyah sesungguhnya memiliki sumber modal yang sangat luar biasa dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya. Model pendirian lembaga pendidikan Muhammadiyah yang *bottom-up* (berangkat dari

bawah/masyarakat/ PRM/PCM) misalnya, tentu sangat jauh berbeda dengan sekolah-sekolah negeri maupun sekolah berlabel Islam Terpadu (IT) yang cenderung *top-down*. Model *bottom-up* yang didominasi oleh semangat juang para pendiri tentunya lebih memiliki ketahanan mental dan spiritual. Dengan berbasis pada masyarakat/PRM/PCM, kesuksesan yang diraih sekolah Muhammadiyah tiada lain karena dorongan serta hasil keringat warga di sekitar lembaga itu.

Sementara, model *top-down* yang di gunakan oleh sekolah-sekolah negeri dan IT lebih bertumpu pada kemampuan elit yayasan tertentu dan atau pemerintah dalam melakukan pembinaan. Dalam bahasa lain, model *top-down* meniscayakan adanya ketergantungan yang teramat sangat kepada elit. Lantas, bagaimana nasib sekolah-sekolah negeri dan IT jika pemerintah atau yayasan yang membinanya itu mengalami gulung tikar? Pertanyaan ini sulit dijawab secara pasti, sebab hal itu sangat tergantung pada elit!

Sesungguhnya, modal dasar yang dimiliki oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah itu bisa diintrodusir menjadi kekuatan potensial dalam mengembangkan budaya mutu. Paling tidak, partisipasi masyarakat/PRM/PCM sekitar dapat difungsikan sebagai bagian dari proses sosialisasi sekolah pada khalayak. Peran serta masyarakat/PRM/PCM dalam mengkampanyekan sekolah Muhammadiyah memberi pengaruh positif dalam mengembalikan kepercayaan (*trust*) publik. Hal itu tentunya harus didukung adanya *political will* dari Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan Muhammadiyah. Tanpa adanya *political will* terhadap peningkatan kualitas mutu pendidikan meniscayakan proses sosialisasi akan menghadapi kendala tersendiri.

Oleh karena itu, untuk menunjang peningkatan kualitas mutu pendidikan Muhammadiyah diperlukan beberapa hal, antara lain; *pertama*, menempatkan sekolah Muhammadiyah sebagai basis/rumah intelektual. Komitmen tersebut perlu ditunjang adanya peningkatan budaya baca-tulis bagi semua komponen pendidikan, seperti; Kepala Sekolah, Guru, Karyawan serta peserta didik. Dengan tingginya budaya baca-tulis di sekolah sangat memungkinkan hadirnya atmosfer baru dalam dunia pendidikan.

Tingginya budaya baca-tulis di lingkungan sekolah juga sangat memungkinkan adanya dorongan terhadap produktivitas di antara komponen pendidikan. Dengan demikian, suasana sekolah sebagai rumah intelektual dapat lebih difungsikan sebagai basis pencerahan (keilmiahan) yang menjanjikan peserta didik merasa nyaman ketika berada di lingkungan pendidikan Muhammadiyah.

Kedua, perlunya reformasi manajemen sekolah. Reformasi manajemen yang dimaksud adalah upaya penggantian budaya-budaya pengelolaan sekolah yang bersifat konvensional dan dialihkan menjadi manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu adalah suatu filosofi komprehensif tentang kehidupan dan kegiatan sekolah. Penekanan terhadap manajemen semacam ini ditujukan untuk perbaikan berkelanjutan sebagai tujuan fundamental dalam peningkatan mutu, produktivitas serta pengurangan pembiayaan (Patricia Kovel-Jarboe, 1993). Dalam konteks ini, pengelola pendidikan Muhammadiyah wajib memiliki jiwa sebagai pembaharu dan tidak merasa tabu dengan segala sesuatu yang baru. Terobosan-terobosan kebijakan yang mendukung munculnya kegiatan-kegiatan inovatif guru, karyawan dan peserta didik patut sesering mungkin dikeluarkan. Sehingga, iklim budaya mutu dapat menjadi nafas bagi setiap gerak komponen pendidikan Muhammadiyah.

Beberapa alternatif di atas tentunya juga perlu didukung oleh kesatuan sikap atas penyuksesan visi-misi sekolah. Inovasi pembelajaran guru serta pelayanan publik (*public service*) karyawan harus didasari oleh pencapaian kepuasan masyarakat. Lewat pendekatan-pendekatan itu sangat dimungkinkan apabila sekolah Muhammadiyah dapat memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) yang memadai. Dengan pembiasaan/budaya mutu yang demikian, sekolah-sekolah Muhammadiyah nantinya dapat menjadi lembaga pendidikan unggulan, sebagaimana yang terjadi pada SMP Muga Yogyakarta [] *Wallahu a'lam bissowab*